



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku pencipta arsip perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disebut SKKAAD adalah sistem pengelolaan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Akses Arsip Dinamis dan Pengamanan Arsip Dinamis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

5. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
7. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
10. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
11. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
12. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
13. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
14. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
15. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
19. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
20. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Pasal 2

- (1) SKKAAD merupakan petunjuk pelaksanaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPOM dalam melakukan pengelolaan Arsip Dinamis dan penentuan hak Akses Arsip bagi publik, serta perlindungan terhadap keamanan Arsip.
- (2) Ruang lingkup SKKAAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
 - b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis;
 - c. Pengamanan Arsip Dinamis; dan
 - d. penyusunan daftar klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 3

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Biasa/Terbuka;
- b. Terbatas; dan
- c. Rahasia.

BAB III

KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penentu kebijakan yang terdiri atas:
 1. Kepala Badan;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. pelaksana kebijakan yang terdiri atas:
 1. pejabat administrator;
 2. pejabat pengawas;
 3. pejabat fungsional; dan
 4. pelaksana;
 - c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan BPOM.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Publik;
 - b. pengawas eksternal; dan
 - c. aparat penegak hukum.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada:
 - a. di bawah kewenangannya; dan
 - b. di bawah kewenangan Kepala Badan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang setingkat sepanjang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada:
 - a. di bawah kewenangannya; dan
 - b. di bawah kewenangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku atasan langsung dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang setingkat sepanjang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka.
- (2) Dalam hal pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengakses Arsip dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas atau Rahasia, perlu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip BPOM dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka.
- (2) Dalam hal Arsip dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia mengandung informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pejabat yang berwenang dapat memberikan akses Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia kepada Publik sepanjang pemohon

dapat membuktikan Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia dimaksud terkait dengan dirinya.

Pasal 9

Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai hak untuk mengakses Arsip BPOM yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis di lingkungan BPOM meliputi penyimpanan dan penyampaian fisik dan informasi Arsip Dinamis yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan fisik dan informasi Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat penyimpanan Arsip konvensional terdiri atas:
 1. *filing cabinet* atau rak Arsip untuk menyimpan Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka dan Terbatas; dan
 2. brankas atau lemari besi untuk menyimpan Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Rahasia;
 - b. tempat penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; dan
 - c. ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Terjaga, dan Arsip Vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

- (4) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa:
- a. kamera pengawas;
 - b. kunci pengamanan ruangan;
 - c. tabung pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. media simpan Arsip.

Pasal 13

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis konvensional sesuai dengan klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka tidak ada persyaratan prosedur khusus;
- b. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas dan/atau Rahasia:
 1. diberi kode “Terbatas” atau “Rahasia”;
 2. menggunakan amplop rangkap dua;
 3. menggunakan amplop segel, stempel terbatas, dan Rahasia; dan
 4. dikirim melalui orang yang sudah diberi kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip atau dokumen Terbatas dan Rahasia.

Pasal 14

Penyampaian dalam rangka penanganan informasi Arsip Dinamis elektronik sesuai dengan klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Biasa/Terbuka tidak ada prosedur khusus;
- b. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas menggunakan paling sedikit enkripsi, surat elektronik yang dikirim dengan alamat khusus, atau *password* apabila pesan elektronik atau surat elektronik berisi data informasi personal; dan
- c. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Terbatas dan Rahasia yaitu:
 1. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau surat elektronik Terbatas dan Rahasia;
 2. menggunakan persandian atau kriptografi; dan
 3. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau surat elektronik.

BAB V

PENYUSUNAN DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 15

- (1) Format penyusunan daftar klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis terdiri atas:

- a. nomor;
 - b. kode klasifikasi;
 - c. jenis Arsip;
 - d. klasifikasi keamanan;
 - e. hak akses;
 - f. dasar pertimbangan; dan
 - g. unit pengolah.
- (2) Ketentuan mengenai daftar klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 213

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Regu Perdana

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. PENYIMPANAN

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL			ARSIP MEDIA ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	<i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2.	Rahasia	a. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “RAHASIA” pada fisik arsip b. Tidak sembarangan	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, APIP di lingkungan BPOM dan pengawas eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	a. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip b. <i>File-file</i> elektronik (termasuk	a. Hanya staf yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang dapat mengakses arsip tersebut b. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital)	a. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus b. <i>Firewall</i> serta sistem dan prosedur deteksi

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL			ARSIP MEDIA ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA
		meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia			<i>database</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	c. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita
3.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap “TERBATAS” pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, APIP di lingkungan BPOM dan pengawas eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	a. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. b. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>database</i>) harus dilindungi terhadap	a. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) b. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	a. Autentikasi <i>server</i> b. Langkah- langkah keamanan dengan <i>Operating</i> <i>System</i> khusus atau aplikasi khusus c. <i>Firewall</i> dan sistem serta prosedur deteksi

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL			ARSIP MEDIA ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA	ARSIP	PENGGUNA	SARANA & PRASARANA
					penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.		terhadap intrusi

B. PENYAMPAIAN

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL	ARSIP MEDIA ELEKTRONIK
1.	Biasa/terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Rahasia	a. Diberi kode rahasia b. Menggunakan amplop dobel c. Amplop segel, stempel rahasia. d. Konfirmasi tanda terima. e. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.	a. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau <i>email</i> . b. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. c. Menggunakan persandian atau kriptografi.

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP MEDIA KONVENSIONAL	ARSIP MEDIA ELEKTRONIK
3.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau <i>email</i> berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, <i>email</i> yang dikirim dengan alamat khusus, <i>password</i> , dan lain-lain.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	KP	KEPEGAWAIAN				
1	KP.01	Bezzeting/Data Persediaan Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
2	KP.02	Formasi Pegawai				
	KP.02.01	Usulan Permintaan Formasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.02.02	Persetujuan/Penetapan Formasi Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.02.03	Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
3	KP.03	Pengadaan Pegawai				
	KP.03.01	Penerimaan				Biro SDM
		a. Lamaran Peserta yang Diterima	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		- Pengumuman Penerimaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Lamaran Peserta				
		- Panggilan Peserta Seleksi				
		- Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan				
		b. Lamaran Peserta yang Tidak Diterima	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
	KP.03.02	Pengangkatan CPNS dan PNS	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
		- Hasil Pemeriksaan Kesehatan				
		- SK Pengangkatan				
	KP.03.03	Prajabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
		- Laporan Pelaksanaan Prajabatan				
	KP.03.04	Penempatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
		- Surat Pernyataan Rencana Penempatan				
4	KP.04	Ujian Kenaikan Pangkat/ Jabatan dan Uji Kompetensi				
	KP.04.01	Hasil Ujian Penyesuaian Ijazah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.04.02	Hasil Ujian Dinas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.04.03	Hasil Uji Kompetensi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
5	KP.05	Mutasi Pegawai				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.05.01	Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.02	Kenaikan Pangkat/ Golongan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.03	Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.04	Penyesuaian Masa Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.05	Mutasi Keluarga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.06	Usul penetapan perubahan data dasar/ status/ kedudukan hukum pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.07	Penyesuaian Tunjangan Kinerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.08	Promosi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.09	Rotasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.10	Perencanaan Suksesi Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.05.11	Seleksi Biasa/Terbuka	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.05.12	Alih Tugas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
6	KP.06	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai				
	KP.06.01	Pengangkatan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.06.02	Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
	KP.06.03	Pemberhentian Pegawai tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro SDM
7	KP.07	Pendelegasian Wewenang				
	KP.07.01	Pelaksana Tugas (Plt)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	KP.07.02	Pelaksana Harian (Plh)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
8	KP.08	Administrasi Pegawai				
	KP.08.01	Data/ Keterangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	KP.08.02	Kartu Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.08.03	Karis/Karsu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.08.04	Kartu Taspen	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.08.05	Kartu Askes/ BPJS/ Jamkesmen	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
9	KP.09	Pembinaan Karir Pegawai				
	KP.09.01	Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.09.02	Pembinaan Mental	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.09.03	Disiplin Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.09.04	Tanda Jasa/Penghargaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
10	KP.10	Pembinaan Jabatan Fungsional				
	KP.10.01	Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
	KP.10.02	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
	KP.10.03	Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
11	KP.11	Kesejahteraan Pegawai				
	KP.11.01	Kesehatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
		- Rekam Medik				
	KP.11.02	Cuti	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	KP.11.03	Rekreasi/ Kesenian/ Olahraga/ HUT/kegiatan keagamaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	KP.11.04	Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	KP.11.05	Pinjaman Dana dan Perumahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM, Balai Besar/Balai, Loka
	KP.11.06	Tunjangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
12	KP.12	Perselisihan/Sengketa/Keberatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
13	KP.13	Organisasi Non Kedinasan				
	KP.13.01	KORPRI	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	KP.13.02	Dharma Wanita	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.13.03	Perhimpunan Kepedulian Sosial Pegawai Badan POM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	KP.13.04	Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
	KP.13.05	Lain-lain	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro SDM
14	KP.14	Berkas Perorangan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
15	KP.15	Manajemen Talenta	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
16	KP.16	Sistem Merit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
17	KP.17	Indeks Profesionalitas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Biro SDM
II	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
1	OT.01	Kelembagaan/Organisasi				
	OT.01.01	Analisis Kelembagaan	Biasa/Terbuka		-	Biro Hukum dan Organisasi
		- Pembentukan Unit Kerja - Perubahan Unit Kerja - Pembubaran Unit Kerja				
	OT.01.02	Evaluasi Kelembagaan	Biasa/Terbuka		-	Biro Hukum dan Organisasi
		- Perubahan Organisasi - Penyempurnaan organisasi.				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	OT.01.03	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka		-	Biro Hukum dan Organisasi
2	OT.02	Tata Laksana				
	OT.02.01	Penyusunan Standar/ Pedoman/Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.02.02	Monitoring dan Evaluasi SOP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.02.03	Sistem Manajemen Mutu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03	Layanan Publik				
	OT.03.01	Layanan Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03.02	Layanan Komunikasi Informasi Edukasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03.03	Layanan Informasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
	OT.03.04	Pengembangan Layanan Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
III	HK	HUKUM				
1	HK.01	Program Legislasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
2	HK.02	Produk Hukum				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	HK.02.01	Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
		- RUU/ Perpu - Peraturan Pemerintah - Peraturan/keputusan, instruksi presiden - Peraturan Pimpinan Badan POM				
	HK.02.02	Produk Hukum yang Bersifat Penetapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
		- Keputusan Kepala Badan - Keputusan Eselon I - Keputusan Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Balai Besar/Kepala Balai POM, Kepala Loka POM - Surat Edaran - Instruksi.				
3	HK.03	Dokumentasi Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
4	HK.04	Penanganan Perkara Litigasi				
	HK.04.01	Perkara Perdata/Niaga	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
	HK.04.02	Perkara Praperadilan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	HK.04.03	Perkara Pidana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
	HK.04.04	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)/	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
5	HK.05	Penanganan Perkara Non Litigasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Hukum dan Organisasi
6	HK.06	Pertimbangan Hukum				
	HK.06.01	Pertimbangan Hukum Permasalahan di Bidang Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
	HK.06.02	Pertimbangan hukum Lainnya di Lingkungan BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Biro Hukum dan Organisasi
7	HK.07	Sosialisasi/ Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
IV	PR	PERENCANAAN				
1	PR.01	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PR.01.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.01.02	Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ Master Plan (RPJM/MP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	PR.02	Program Kerja Tahunan				
	PR.02.01	Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.02.02	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.02.03	Program Kerja Tahunan Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
3	PR.03	Penetapan/Kontrak Kerja				
	PR.03.01	Kepala BPOM dan Pejabat Eselon I	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.03.02	Pimpinan Unit Kerja (Pejabat Eselon dan Kepala UPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
4	PR.04	Indikator Kinerja Utama				
	PR.04.01	Indikator Kinerja Utama BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.04.02	Indikator Kinerja Utama Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
5	PR.05	Perencanaan Anggaran				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PR.05.01	RKA-KL/Pagu Indikatif/Sementara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.05.02	Pagu Definitif	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.05.03	DIPA	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.05.04	POK	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.05.05	Target PNB	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
6	PR.06	Rencana Kinerja Tahunan				
	PR.06.01	Rencana Kinerja Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.06.02	Rencana Kinerja Instansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
7	PR.07	Perjanjian Kinerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
8	PR.08	Laporan				
	PR.08.01	Laporan Bulanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.02	Laporan Triwulan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PR.08.03	Laporan Semesteran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.04	Laporan Tahunan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.05	Laporan Tahunan UPT	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.06	Laporan Tahunan BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.08.07	Laporan Insidental	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
9	PR.09	Laporan Kinerja				
	PR.09.01	Laporan Kinerja Unit kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.09.02	Laporan Kinerja UPT				
	PR.09.03	Laporan Kinerja BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
10	PR.10	Evaluasi Program				
	PR.10.01	Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	PR.10.02	Evaluasi Program BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
V	KU	KEUANGAN				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	KU.01	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU APBN-P	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	KU.02	Pelaksanaan Anggaran				
	KU.02.01	Pengajuan UP/TUP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.02.02	Pencairan Anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), - SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), - SSP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) - Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM) -Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), - Juklak/mechanisme pengelolaan APBN - Bahan Nota Keuangan. 				
	KU.02.03	Pengelolaan Belanja Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.02.04	Keterangan Penghasilan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.02.05	SKPP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.02.06	Laporan Arus Kas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Berita Acara Pemeriksaan - Kas/ register Penutupan Kas - Laporan realisasi anggaran (LRA) termasuk Arsip data komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran(LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran				
	KU.02.07	Data Rekening Bendahara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
3	KU.03	Pengelolaan Perbendaharaan				
	KU.03.01	Perbendaharaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.02	KP4 (Kartu Pengawas Pembayaran Penghasilan Pegawai)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.03	Pajak	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.04	Penerimaan Non Pajak	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.05	Pengembalian Belanja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.06	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.03.07	Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.03.08	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
4	KU.04	Bantuan/Hibah/Pinjaman Luar Negeri				
	KU.04.01	Kesanggupan Negara Donor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.04.02	Nota Kesepahaman (MoU)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.04.03	Loan Agreement PHLN KS	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
		- <i>Draft Agreement</i> - <i>Legal opinion</i> - Korespondensi dengan lender				
	KU.04.04	Alokasi dan Relokasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.04.05	Realisasi Pencairan Dana BLN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
		- SP2D - SPM beserta lampiran antara lain SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.				
	KU.04.06	<i>Replenishment</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
		- <i>No Objection Letter (NOL)</i> - <i>Project implementation</i> - <i>Notification of contract</i> - <i>Withdrawal authorization (WA)</i>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- <i>Statement of Expenditure (SE)</i>				
	KU.04.07	<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	KU.04.08	Report/Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
		- <i>Progress report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly report</i>				
	KU.04.09	Ketentuan/Peraturan Pinjam Luar Negeri (Pindah Bag. Hukum)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan
5	KU.05	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)				
	KU.05.01	Kebijakan SAI	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	KU.05.02	Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	KU.05.03	Daftar Transaksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Daftar Transaksi (DT) - Pengeluaran (PK) - Penerimaan (PN) - Dokumen Sumber (DS) - Bukti Jurnal (BJ) - Surat Tanda Setor (STS)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Surat Setor Bukan Pajak (SSBP), - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - SPM - Daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)				
	KU.05.04	Laporan Realisasi Bulanan SAI	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	KU.05.05	Laporan Realisasi Triwulan SAI	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan proses pengolahan informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
	KU.05.06	Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Perencanaan dan Keuangan, Balai Besar/Balai, Loka
		- Laporan Keuangan Bulanan - Laporan Keuangan Triwulan - Laporan Keuangan Semester - Laporan Keuangan Tahunan (<i>Unaudited</i>) - Laporan Keuangan Tahunan <i>Audited</i>				
VI	KS	KERJA SAMA				
1	KS.01	Kerja Sama Dalam Negeri				
	KS.01.01	Antar Instansi Pemerintah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KS.01.02	Organisasi Non Pemerintah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi				
2	KS.02	Kerja Sama Luar Negeri				
	KS.02.01	Bilateral	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi				
	KS.02.02	Multilateral	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi				
	KS.02.03	Regional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Hasil kajian - Perjanjian Kerja Sama - Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi				
VII	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT				
1	HM.01	Komunikasi dan Publikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Dokumen wawancara dan <i>talkshow</i>				
		- Siaran pers/klarifikasi/penjelasan				
		- Laporan <i>monitoring</i> pemberitaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Materi media sosial				
2	HM.02	Dengar Pendapat/ Hearing DPR terkait BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Bahan sidang kabinet				
		- RDD DPR/DPD RI				
		- Rakor Tingkat Badan termasuk hasil rumusan dan transkrip				
		- Bahan rapat terbatas BPOM				
		- Pidato Kepala BPOM				
		- Bahan Pidato Kenegaraan				
3	HM.03	Hubungan Antar Lembaga				
	HM.03.01	Lembaga Negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.02	Perusahaan				
		- Pernyataan Badan POM terkait masalah Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.03.03	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- <i>Release</i> Badan POM terkait masalah Obat dan Makanan				
	HM.03.04	Perguruan Tinggi/ Sekolah	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Permohonan Narasumber				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	HM.03.05	Bakohumas	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
		- Surat Undangan Diseminasi Informasi				
4	HM.04	Keprotokolan				
	HM.04.01	Upacara/ Acara Kedinasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	HM.04.02	Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	HM.04.03	Agenda Pimpinan BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
5	HM.05	Penyiapan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Bahan Informasi (hasil telaahan, <i>policy brief</i> , rancangan eksekutif)				
		- naskah/ <i>pointer</i> sambutan, materi presentasi, materi wawancara dengan media				
		- laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program strategis				
6	HM.06	Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
	HM.07	Penerbitan dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	HM.08	Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk, dan Iklan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Hukum dan Organisasi
8	HM.09	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
9	HM.10	Pemberian Ucapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
10	HM.11	Pengelolaan Konten Website terkait berita aktual	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
VIII	PL	PERLENGKAPAN				
1	PL.01	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	PL.01.01	Analisa Kebutuhan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		-Daftar barang dan jasa yang sudah ada				
		-Usulan barang dan jasa yang akan diadakan dari unit kerja				
		-Dokumen persetujuan pengadaan barang dan jasa (RKBMN)				
	PL.01.02	Daftar Penyedia Barang dan Jasa	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
2	PL.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	PL.02.01	E-Purchasing	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK,				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none">- Spesifikasi Teknis,- <i>Draft</i> Kontrak,- HPS,- SPK,- BAST,- BA Pembayaran				
	PL.02.02	Pengadaan Langsung	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		<ul style="list-style-type: none">- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK,- KAK,- Spesifikasi Teknis,- <i>Draft</i> Kontrak,- HPS,- SPK,- BAST,- BA Pembayaran				
	PL.02.03	Penunjukan Langsung	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		<ul style="list-style-type: none">- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK,- KAK,- Spesifikasi Teknis,- <i>Draft</i> Kontrak,- HPS,- SPK,- BAST,- BA Pembayaran- Dokumen penunjukan langsung				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PL.02.04	Tender Cepat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK - Spesifikasi Teknis - <i>Draft</i> Kontrak - HPS - SPK - BAST - BA Pembayaran - Dokumen tender				
	PL.02.05	Tender	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Surat usulan dari penanggung jawab kegiatan kepada PPK, - KAK - Spesifikasi Teknis - <i>Draft</i> Kontrak - HPS - SPK - BAST - BA Pembayaran - Dokumen tender				
	PL.02.06	Swakelola	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- SK Tim Swakelola - SK Pengadaan Swakelola				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- SK Tim Pemeriksa Swakelola - Dokumen Swakelola				
	PL.02.07	Sayembara	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- SK Tim Sayembara - SK Penetapan Sayembara - SK Penerima Hasil Sayembara - Dokumen Sayembara				
3	PL.03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				
	PL.03.01	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Laporan Penatausahaan BMN				
	PL.03.02	Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Daftar inventarisasi BMN				
	PL.03.03	Pendistribusian	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- BAST				
	PL.03.04	Penetapan Status penggunaan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	PL.03.05	Pemeliharaan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Usulan Pemeliharaan				
		- Laporan Pemeliharaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PL.03.06	Pemanfaatan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Usulan Pemanfaatan				
		- Laporan Pemanfaatan				
	PL.03.07	Pemindahtanganan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Usulan Pemindahtanganan				
		- Berita Acara Pemindahtanganan BMN				
	PL.03.08	Penyusutan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Daftar BMN yang akan disusutkan				
		- Laporan Penyusutan				
		- Berita Acara Penyusutan BMN				
	PL.03.09	Penghapusan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Usulan daftar BMN yang akan dihapus - Daftar BMN yang dinilai kembali - SK Persetujuan penghapusan				
	PL.03.10	Pelaporan BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	PL.03.11	Pembinaan/Pengendalian/Pengawasan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
IX	RT	KERUMAHTANGGAAN				
1	RT.01	Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Daftar PABX				
		- Bukti pembayaran				
2	RT.02	Penggunaan Fasilitas Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- <i>Form</i> peminjaman fasilitas kantor - Permohonan peminjaman - Rekap penggunaan fasilitas kantor				
3	RT.03	Pengurusan Kendaraan Dinas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
		- <i>Form</i> peminjaman kendaraan				
		- Permohonan peminjaman kendaraan				
		- Pengelolaan BBM kendaraan dinas				
		- <i>Form</i> pemeliharaan kendaraan dinas				
4	RT.04	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
		- Formulir permintaan perbaikan sarana dan prasarana				
		- Permohonan perbaikan sarana dan prasarana				
		- Rekap tahunan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana				
5	RT.05	Renovasi Gedung dan Bangunan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
		- Gambar Teknis Bangunan				
		- <i>Form</i> usulan renovasi gedung dan bangunan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan hasil pekerjaan renovasi gedung dan bangunan				
		- BAST				
6	RT.06	Pemeliharaan Fasilitas Kantor				
	RT.06.01	Jalan dan Lingkungan Kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- <i>Form</i> usulan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor				
		- Laporan hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor				
	RT.06.02	Alat Elektronik dan Jaringan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- <i>Form</i> usulan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor				
		- Laporan hasil pekerjaan pemeliharaan jalan dan lingkungan kantor				
7	RT.07	Pengelolaan Lingkungan dan Limbah				
	RT.07.01	Pengelolaan limbah laboratorium	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
	RT.07.02	Pengelolaan K3	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Permohonan - Hasil analisis pemeriksaan - Sertifikat hasil				
8	RT.08	Ketertiban dan Keamanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Jadwal penjagaan - Laporan ketertiban dan keamanan				
X	KA	KEARSIPAN				
1	KA.01	Administrasi Persuratan				
	KA.01.01	Pengurusan Surat Masuk	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Buku agenda - Formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan arsip				
	KA.01.02	Pengurusan Surat Keluar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
		- Buku Penomoran Surat - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi				
2	KA.02	Penyusunan Sistem	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Biro Umum
		- Pedoman/Juklak/Juknis Kearsipan.				
3	KA.03	Pembinaan Kearsipan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Biro Umum
4	KA.04	Pengelolaan Arsip Dinamis				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KA.04.01	Penataan Arsip	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
	KA.04.02	Pemindahan Arsip	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Biro Umum
	KA.04.03	Pemusnahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
	KA.04.04	Penyerahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
5	KA.05	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
6	KA.06	Layanan Kearsipan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Biro Umum
XI	PS	KEPUSTAKAAN				
1	PS.01	Pengadaan				
	PS.01.01	Pengadaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Usulan bahan pustaka				
		- Daftar pengadaan bahan pustaka				
	PS.01.02	Pengadaan Penunjang Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2	PS.02	Sosialisasi Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	PS.03	Pengurusan ISBN/ISSN	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
4	PS.04	Pengelolaan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Surat Penerimaan buku dari Unit				
		- Surat Penyerahan buku atau majalah ke Unit				
		- Penyerahan Bukti Rekam Cetak Buku yang dihasilkan BPOM				
5	PS.05	Layanan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		- Form/buku peminjaman				
		- Form rujukan layanan pustaka				
XII	TI	TEKNOLOGI DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN				
1	TI.01	INFRASTRUKTUR TIK				
	TI.01.01	Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.02	Standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.03	Pemenuhan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.04	Tingkat Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi SDM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	TI.01.05	Keluhan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.01.06	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
2	TI.02	Sistem Informasi				
	TI.02.01	Pengembangan Sistem <i>E-Government</i> Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital/Pengelolaan <i>Website</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
3	TI.03	Tata Kelola Data dan Informasi			-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.01	Data Berbagi Pakai	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.02	Data dan Informasi yang Mutakhir	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.03	Standar Tata Kelola Data	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.04	Pemeliharaan sistem, pengembangan data dan informasi pada Badan POM <i>Operational Center</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.05	Pemeliharaan Layanan <i>Contact Center</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.03.06	<i>Back Office Contact Center</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	TI.03.07	Pengelolaan Data	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
4	TI.04	Perencanaan dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi				
	TI.04.01	Pemenuhan BCM (<i>Business Continuity Management</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.02	Indeks CSIRT (<i>Cyber Security Incident Response Team</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.03	Standar Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.04	Pemeliharaan <i>Gateway</i> Tanda Tangan Elektronik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.05	Standar Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.06	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPOM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	TI.04.07	<i>Masterplan</i> TIK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
5	TI.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
XIII	PB	PENGEMBANGAN PEGAWAI (PENDIDIKAN DAN LATIHAN)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	PB.01	Standarisasi dan Penilaian Kompetensi SDM				
	PB.01.01	Penyusunan Standar Kompetensi	Biasa/Terbuka		-	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.01.02	Penyusunan Kurikulum Diklat	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
		- Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis JF-PFM (<i>Draft</i>) - Pedoman Penyusunan Kurikulum (<i>Draft</i>) - Kurikulum Modul <i>Management Development Programme</i> (MDP) - Kurikulum Modul <i>Supervisor Development Programme</i> (SDP) - Kurikulum Modul <i>Eksekutif Development Programme</i> (EDP) (<i>Draft</i>)				
	PB.01.03	Penilaian Kompetensi Teknis	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.01.04	Penilaian Kompetensi Manajerial	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
	PB.01.05	Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.01.06	Sertifikasi Kompetensi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
2	PB.02	Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM				
	PB.02.01	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.02.02	Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.02.03	Pendidikan Lanjutan SDM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						SDM Pengawasan Obat dan Makanan
3	PB.03	Pengelolaan dan Pembinaan Pengawas Farmasi Obat dan Makanan (PFM)				
	PB.03.01	Penilaian Angka Kredit/Kinerja Pengawas Farmasi Obat dan Makanan (PFM)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
	PB.03.02	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan dan <i>District Food Inspector</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
XIV	PI	PENGAWASAN INTERN				
1	PI.01	Rencana Program Pengawasan Intern				
	PI.01.01	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	PI.01.02	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	PI.01.03	Rencana Induk Pengawasan (RIP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
2	PI.02	Audit				
	PI.02.01	Audit Kinerja/Audit Operasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II
	PI.02.02	-				
	PI.02.03	Audit dengan tujuan tertentu	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
	PI.02.04	Audit internal QMS ISO 9001:2015	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II
3	PI.03	Reviu				
	PI.03.01	Reviu Laporan Keuangan - Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II
	PI.03.02	Reviu RKA-K/L	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II
	PI.03.03	Reviu RKBMN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II
4	PI.04	Evaluasi AKIP	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II
5	PI.05	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal - Penyelesaian Kerugian Negara				
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal - Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Pemeriksaan Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	PI.06	Pengawasan Intern Lainnya				
	PI.06.01	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	PI.06.02	Gratifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Inspektorat I dan II
	PI.06.03	Benturan Kepentingan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Inspektorat I dan II
	PI.06.04	Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan internal	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	Inspektorat I dan II
	PI.06.05	Whistleblowing System	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Inspektorat I dan II

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					2. Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
	PI.06.06	Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) - Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> Rekomendasi Hasil Survei bidang pengawasan intern - Pengendalian kecurangan (<i>Fraud Control Plan</i> -FCP), pencegahan korupsi, dan pelaksanaan aksi Stranas PK	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	PI.06.07	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Manajemen Risiko dan PM-EPITE)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	PI.06.08	Kapabilitas APIP (Internal Audit <i>Capability</i> Model - IACM)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
		Telaah Sejawat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		
	PI.06.09	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II
	PI.06.10	Konsultasi, Asistensi, Pendampingan Pengawasan Intern	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Inspektorat I dan II

B. DAFTAR KLASIFIKASI DAN KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	RK.	ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN				
1	RK.01	Penyusunan Rencana Induk	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Rencana induk				
		- Dokumen terkait rapat identifikasi kebutuhan				
		- Permintaan/proposal riset				
2	RK.02	Pelaksanaan Analisis Kebijakan				
		- Instrumen Survei	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Surat Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Surat tugas dan surat izin	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Laporan uji coba	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Laporan hasil analisis kebijakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	RK.03	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Formulir Hasil survei kepuasan pelanggan				
		- Formulir hasil monev				
4	RK.04	Diseminasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
		- Materi diseminasi internal				
		- Materi diseminasi eksternal				
		- Laporan hasil diseminasi internal				
		- Laporan hasil diseminasi eksternal				
II	SD	STANDARDISASI				
1	SD.01	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif				
	SD.01.01	Pengumpulan Data dan Pengkajian Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
	SD.01.02	Penyusunan Rancangan Awal	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
	SD.01.03	Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat pembahasan dengan <i>stakeholder</i>				
		- Rancangan hasil pembahasan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	SD.01.04	Konsultasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat konsultasi publik				
		- Masukan dari <i>stakeholder</i>				
	SD.01.05	Finalisasi Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen rapat finalisasi rancangan				
		- Rancangan final standar				
	SD.01.06	Persetujuan Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- <i>Form</i> verbal				
		- Peraturan/standar/pedoman/ <i>code of practice</i>				
	SD.01.07	Pengkajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Hasil kajian/rekomendasi				
		- Dokumen rapat pembahasan hasil kajian				
	SD.01.08	Harmonisasi Standar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi ONPP, dan Zat Adiktif
		- Dokumen harmonisasi standar				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	SD.02	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (OTSK KOS)				
	SD.02.01	<i>Brainstorming</i> Penyusunan Regulasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.02	Data Hasil Pengkajian Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.03	Rancangan Awal Regulasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.04	Hasil Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.05	Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.06	Konsultasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.07	Finalisasi Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.08	Persetujuan Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.09	Harmonisasi Standar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	SD.02.10	Pengkajian Keamanan, Mutu dan Manfaat OTSK KOS	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
	SD.02.11	<i>Monitoring/Evaluasi Implementasi/Regulatory Impact Assessment (RIA)</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi OTSK KOS
3	SD.03	Standardisasi Pangan Olahan				
	SD.03.01	Pengumpulan Data dan Pengkajian Pustaka	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	SD.03.02	Penyusunan Rancangan Awal	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	SD.03.03	Pembahasan dengan <i>Stakeholder</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- Dokumen rapat pembahasan dengan stakeholder				
		- Rancangan hasil pembahasan				
	SD.03.04	Konsultasi Publik	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- Dokumen rapat konsultasi publik				
		- Masukan dari <i>stakeholder</i>				
	SD.03.05	Finalisasi Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- Dokumen rapat finalisasi rancangan				
		- Rancangan final standar				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	SD.03.06	Persetujuan Rancangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- <i>Form</i> verbal				
		- Peraturan/ standar/ pedoman/ <i>code of practice/ policy paper</i> (naskah kebijakan)				
	SD.03.07	Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- Dokumen rapat pembahasan hasil kajian				
	SD.03.08	Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan Permintaan <i>Stakeholder</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- Dokumen permohonan dari stakeholder				
		- hasil kajian				
		- Surat persetujuan/penolakan				
	SD.03.09	Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan terkait Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
	SD.03.10	Harmonisasi Standar	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
		- Dokumen harmonisasi Standardisasi Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan				
		- Persiapan penyusunan posisi Indonesia				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan hasil keikutsertaan di forum internasional				
III	RG	REGISTRASI				
1	RG.01	Registrasi Obat				
	RG.01.01	Pra Registrasi - Pra registrasi (file yang diunggah pendaftar)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
	RG.01.02	Proses Evaluasi				
		a. Evaluasi Registrasi Obat baru dan Produk Biologi - registrasi obat baru dan produk biologi (file yang diunggah pendaftar)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		b. Evaluasi Registrasi Obat pada kondisi khusus (pandemi) - dokumen khasiat keamanan: kajian hasil evaluasi khasiat dan keamanan dan hasil keputusan komite nasional penilai obat - dokumen mutu dan penandaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		c. Evaluasi Registrasi Obat Generik - Dokumen mutu dan penandaan - Hasil penilaian in-situ (inspeksi ke sarana produksi obat)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		d. Proses Uji Bio Ekuivalensi (BE) - Dokumen laporan uji BE - Informasi teknis hasil penilaian laporan uji BE - Nota dinas hasil penilaian laporan uji BE - Surat persetujuan hasil penilaian laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		BE - Surat penolakan hasil uji BE - Informasi teknis hasil pembahasan uji BE				
	RG.01.03	Nomor Izin Edar				
		a. Persetujuan Nomor Izin Edar	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		- Sertifikat izin edar (NIE) - Surat Persetujuan Perubahan - Notifikasi				
		a. Data Induk Nomor Izin Edar (NIE)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
	RG.01.04	Pengembalian NIE	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		- Dokumen pengembalian NIE				
		- Dokumen pencabutan/pembatalan NIE				
		- Dokumen pembekuan NIE				
	RG.01.05	<i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		- <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i> <i>Indonesia</i>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- <i>Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)</i> <i>negara lain</i>				
		Persetujuan Pelaksanaan Uji BE				
	RG.01.06	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik dan Obat Pengembangan Baru (OPB)				
		a. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		- Dokumen pengajuan dan progres uji klinik - Hasil kajian - Persetujuan Protokol Uji Klinik - Hasil inspeksi				
		b. Obat Pengembangan Baru (OPB)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
	RG.01.07	Persetujuan Pemasukan Obat Jalur Khusus (<i>Special Access Scheme</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat
		- Dokumen pengajuan SAS - Laporan Deputi/Kepala Badan - Persetujuan SAS				
	RG.01.08	Kajian Khusus Obat, (termasuk kasus)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Obat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Permintaan Kajian - Data referensi terkait isu - Dokumen Pembahasan - Laporan - Hasil kajian - Dokumen hasil evaluasi registrasi obat berupa informasi teknis, hasil evaluasi obat (termasuk dokumen surat komnas dan Uji BE) - Hasil kajian pra registrasi - Kajian khusus obat (masa pandemi) 				
2	RG.02	Registrasi OTSK KOS dan Uji Klinik				
	RG.02.01	Registrasi OTSK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		a. Penolakan Registrasi <ul style="list-style-type: none"> - Arsip permohonan (data teknis dan data administrasi); - Surat penolakan/tambahan data; 				
		b. Persetujuan Registrasi <ul style="list-style-type: none"> - Arsip permohonan (data teknis dan data administrasi); - Surat persetujuan registrasi/tambahan data. - Buku konsep nomer OTSK 				
	RG.02.02	Registrasi Akun Perusahaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RG.02.03	Notifikasi Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Data administrasi (<i>hardcopy</i>); - Data teknis (dari sistem)				
		Data Induk Nomor Izin Edar (NIE)	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
	RG.02.04	Pengembalian NIE	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Data Teknis dan Administrasi; - Hasil Pengawasan; - Surat Pembatalan Izin Edar				
	RG.02.05	Permohonan Protokol Uji Praklinik/Uji Klinik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Administrasi Protokol Uji Praklinik/Uji Klinik ; - Berkas inspeksi CUKB.				
	RG.02.06	Penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Berita Acara Penilaian dan Hasil Penilaian DIP; - Surat Tindak lanjut Penilaian DIP; - Berkas CAPA DIP.				
	RG.02.07	Permohonan Rancangan Iklan OTSK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi OTSK KOS
		- Surat persetujuan - Surat penolakan				
3	RG.03	Registrasi Pangan Olahan				
	RG.03.01	Permohonan Registrasi Baru	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Izin Edar Pangan Olahan				
	RG.03.02	Variasi Major	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Persetujuan Registrasi Variasi Major				
	RG.03.03	Variasi Minor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Persetujuan Registrasi Variasi Minor				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RG.03.04	Registrasi Ulang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	RG.03.05	Pendaftaran Iklan Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
	RG.03.06	Registrasi Akun Perusahaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		- Izin Edar Pangan Olahan				
	RG.03.07	Pencabutan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
		Data Induk Nomor Izin Edar (NIE)	Biasa/Terbuka /Biasa	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
IV	PW	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				
1	PW.01	Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif				
	PW.01.01	Pelaksanaan Inspeksi Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						Psikotropika dan Prekursor
		-Agenda Inspeksi (<i>Aide Memoire</i> , Surat Tugas)				
		-Laporan Hasil Inspeksi				
		-Surat Tindak Lanjut Hasil Inspeksi				
		-Laporan inspeksi sarana produksi dari BPOM				
		-Laporan dan surat hasil evaluasi CAPA hasil inspeksi				
	PW.01.02	Asistensi Regulatori dan Supervisi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		-Agenda Inspeksi				
		-Berita Acara Pemeriksaan				
		-Lembar Hasil Inspeksi				
	PW.01.03	Perizinan Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		-Izin Usaha Industri farmasi, Bahan Baku Obat, dan Sarana Khusus				
		-SK pencabutan Izin Industri Farmasi				
		-Dokumen yang berhubungan dengan <i>Site Master Plan</i>				
		-Data Sarana Produksi Bahan Baku Obat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.01.04	Penilaian Pemenuhan CPOB terhadap Sarana Produksi Obat, NPP, Bahan Baku Obat, Sarana Khusus dan Fasilitas Obat Impor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		-Sertifikat CPOB/CPBBAOB yang diterbitkan				
		-Sertifikat CPOB/CPBBAOB yang dikembalikan				
		-Persetujuan penggunaan fasilitas bersama				
		-Surat keterangan GMP untuk ekspor				
		-Penilaian dokumen registrasi obat impor terkait pemenuhan CPOB				
	PW.01.05	Pemeriksaan Balai				
	PW.01.06	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Obat oleh Pusat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		- Surat Tugas				
		- Berita Acara Pemeriksaan				
		- Lampiran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan				
		- Laporan Hasil Pemeriksaan				
		- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
		- Dokumen <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA)				
	PW.01.07	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Obat oleh Pusat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Direktorat Pengawasan Produksi Obat,

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		terkait dengan kasus/ peristiwa berskala nasional				Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		- Surat Tugas				
		- Berita Acara Pemeriksaan				
		- Lampiran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan				
		- Laporan Hasil Pemeriksaan				
		- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
		- Dokumen <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA)				
	PW.01.08	<i>Special Access Scheme</i> (SAS)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		1. Pemeriksaan terkait <i>Special Access Scheme</i> (SAS)				
		- Surat Tugas				
		- Berita Acara Pemeriksaan				
		- Lampiran Dokumen Berita Acara Pemeriksaan				
		- Laporan Hasil Pemeriksaan				
		- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
		- Dokumen <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA)				
		2. Persetujuan pemasukan obat jalur khusus <i>Special Access Scheme</i> (SAS)				
		3. Dokumen terkait pengawasan peredaran obat secara daring				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		4. Laporan dari fasilitas pengelola obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor serta SAS				
	PW.01.09	Penilaian/Sertifikasi CDOB				
		-Sertifikat CDOB yang diterbitkan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		-Surat rekomendasi izin PBF dalam rangka pemenuhan CDOB	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya		
		-Dokumen CAPA	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		-Berkas tembusan izin PBF Pusat dari Kementerian Kesehatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		-Berkas tembusan rekomendasi izin PBF cabang dari Balai Besar/Balai POM	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
	PW.01.10	Pengawasan Sarana Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		- Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BB/BPOM terkait sarana pelayanan dan kefarmasian				
		- Laporan hasil pengawasan penjualan <i>online</i>				
		- Laporan hasil evaluasi CAPA				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan kajian sarana pelayanan dan kefarmasian				
		- Laporan Bimbingan Teknis CDOB				
		- Dokumen terkait <i>Pilot Project</i>				
		- Dokumen terkait Barang bukti tindak pidana				
		- Laporan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor				
		- Surat pemberhentian sementara				
		- Surat pencabutan izin edar				
		- Surat peringatan keras				
		- Laporan pembinaan PKM				
	PW.01.11	Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA
		- Laporan Kejadian tidak diinginkan / Efek Samping Obat (KTD/ESO) dari tenaga kesehatan				
		- Laporan farmakovigilans dari pemilik izin edar /EUA				
		- Kajian farmakovigilans				
		- Dokumen inspeksi farmakovigilans				
	PW.01.12	Pengawasan Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA
		1. Rancangan Final Pedoman Sampling dan Pengujian ONPPZA				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Dokumen Forum Koordinasi Pusat dan UPT dalam Perencanaan Sampling dan Pengujian ONPPZA				
		- Dokumen Penyusunan Rancangan pedoman Sampling dan Pengujian ONPPZA				
		2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sampling dan Pengujian				
		- Laporan hasil sampling				
		- Laporan hasil pengujian				
		- Dokumen evaluasi perubahan perencanaan sampling				
		- Dokumen evaluasi sampling dan pengujian				
		3. Tindak Lanjut Pengawasan Obat TMS				
		- Dokumen Tindak Lanjut Obat TMS				
		- Surat Penarikan dan/atau sanksi terkait obat TMS				
		- Laporan <i>Monitoring</i> Penarikan Obat TMS				
		- Dokumen Evaluasi Tindak Lanjut Penarikan Obat TMS dari Industri Farmasi				
		4. Dokumen Tindak Lanjut terkait kasus mutu obat				
		- Dokumen Tindak Lanjut terkait kasus mutu obat				
		- Surat Penarikan dan/atau sanksi terkait kasus mutu obat				
		- Laporan <i>Monitoring</i> Penarikan kasus mutu obat				
		- Dokumen Evaluasi Tindak Lanjut Penarikan kasus mutu obat dari Industri Farmasi				
		- Dokumen Publikasi terkait kasus mutu obat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		5. Dokumen kerja sama terkait pengawasan mutu obat				
		- Dokumen MoU, PKS, dan/atau NDA				
		-Dokumen implementasi kerja sama				
	PW.01.13	Pengawasan Promosi dan Informasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Distribusi, Direktorat KMEI
		- Surat Respon ke BB/Balai POM				
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Iklan Obat kepada Industri Farmasi				
		- Surat Tanggapan atas Respon Industri				
		- Surat Rekomendasi Penutupan Situs Internet kepada Kemenkominfo				
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Promosi /Iklan Obat pada Media Internet kepada Pemilik Situs				
		- Surat Tanggapan Pemilik Situs Internet				
		- Surat Permintaan Normalisasi Situs Internet kepada Kemenkominfo				
		- Dokumen Pengawasan promosi/iklan obat sebelum dipublikasikan				
		- Dokumen Pengawasan promosi/iklan obat setelah dipublikasikan				
		- Laporan pengaduan masyarakat terkait iklan obat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Dokumen Pengawasan penandaan obat beredar (surat respon ke BB/Balai POM, Tindak Lanjut dan Tanggapan ke industri farmasi)				
		- Laporan evaluasi kemasan siap edar				
		- Laporan pembinaan dalam rangka peningkatan kepatuhan pemenuhan iklan dan penandaan obat ke industri farmasi				
		- Dokumen rekomendasi penutupan situs internet dan permintaan normalisasi situs internet kepada Kemenkominfo				
		- Dokumen tindak lanjut pelanggaran dan tanggapan promosi iklan obat pada media internet kepada pemilik situs				
	PW.01.14	Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA
		1. Perizinan dalam pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP				
		- Surat Keterangan Impor (SKI)				
		- Permohonan Web Reg/SKI Manual				
		- Tembusan Surat SAS (<i>Special Access Scheme</i>) dari Direktorat Registrasi Obat				
		- Rekomendasi Persetujuan Impor Obat sebagai Barang Komplementer				
		-Rekomendasi Importir Produsen Bahan Berbahaya untuk Obat				
		- Sertifikat Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika dan Prekursor				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		2. Pengawasan terhadap produk dan sarana dalam rangka verifikasi data realisasi impor dan ekspor Obat dan NPP				
		- Laporan tindak lanjut dan/atau Berita Acara Sampling Vaksin/Verifikasi Vaksin				
		-Laporan tindak lanjut dan Berita Acara Pemeriksaan Sarana				
		3. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pengawasan Ekspor Impor Obat dan NPP				
		-Laporan sosialisasi -Data peserta sosialisasi -Data materi dan pelaksanaan				
	PW.01.15	Pengawasan Produk Tembakau	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan KMEI ONAPPZA
		1. Pengawasan Promosi/Iklan Produk Tembakau				
		- Laporan Pengawasan Promosi/Iklan Produk Tembakau				
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Promosi/Iklan Produk Tembakau kepada Industri Rokok				
		- Surat Tindak Lanjut Rekomendasi terkait Pelanggaran Promosi/Iklan Produk Tembakau kepada Instansi terkait				
		2. Pengawasan Label Produk Tembakau				
		- Laporan Pengawasan Label Produk Tembakau				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan Hasil Pengujian Kandungan Nikotin dan Tar dari Laboratorium Pengujian Badan POM				
		- Laporan Contoh Kemasan Produk Tembakau dari Produsen				
		- Laporan Hasil Pengujian Kandungan Nikotin dan Tar dari Produsen				
		- Surat Tindak Lanjut Pelanggaran Label Produk Tembakau kepada Industri Rokok/Importir				
		- Surat Tindak Lanjut Rekomendasi terkait Pelanggaran Label Produk Tembakau kepada Instansi terkait				
		3. Lain-lain				
		- Laporan Kajian Pengawasan Produk Tembakau				
		- Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana dan Berita Acara Pemeriksaan Sarana (BAP Rokok)				
		- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Rokok				
		- <i>Proceeding</i> Hasil Pengawasan Rokok				
		- Dokumen KIE				
2	PW.02	Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan				
	PW.02.01	Penilaian Sarana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		- Surat tugas; - <i>Aide memoire</i> ;				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Rencana inspeksi; - Daftar Hadir; - Agenda Inspeksi; - Berita Acara Pemeriksaan; - Surat Tindak Lanjut Hasil Inspeksi dan Laporan Hasil Inspeksi; - Surat Evaluasi/ <i>Closed</i> CAPA - Sertifikat CPOTB - Sertifikat CPOTB Bertahap - Surat Evaluasi dan/atau Rekomendasi Denah/Rencana Induk Pembangunan (RIP)/ Sistem Tata Udara (STU) - Surat Evaluasi dan/atau Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas OT dan Non OT 				
	PW.02.02	Inspeksi Sarana				
		- Laporan Rutin hasil inspeksi dari UPT BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		Dokumen Pemeriksaan Rutin : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas - Rencana Inspeksi - <i>Aide Memoire</i> - Agenda Inspeksi - Daftar Hadir - Berita Acara Pemeriksaan - Berita Acara Pengambilan Contoh/Sampling - Berita Acara Pengamanan Setempat/Produk Dalam Pengawasan 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Badan POM - Berita Acara Pemusnahan - Berita Acara Penolakan Tindak lanjut hasil inspeksi Rutin : - Laporan Hasil Inspeksi - Surat Tindak Lanjut/ Evaluasi/ <i>Closed</i> CAPA - Surat Peringatan CAPA I, II dan Peringatan Keras.				
		Dokumen Pemeriksaan Kasus	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		- Surat Tugas - Rencana Inspeksi - Aide Memoire - Agenda Inspeksi - Daftar Hadir - Berita Acara Pemeriksaan - Berita Acara Pengambilan Contoh/Sampling - Berita Acara Pengamanan Setempat/Produk Dalam Pengawasan Badan POM - Berita Acara Pemusnahan - Berita Acara Penolakan Tindak lanjut hasil inspeksi Kasus : - Berita Acara Hasil Inspeksi - Laporan Hasil Inspeksi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Tindak lanjut hasil inspeksi - Surat Tindak Lanjut/ Evaluasi/ <i>Closed</i> CAPA - Surat Peringatan CAPA I, II dan Peringatan Keras.				
	PW.02.03	Pengawasan Informasi dan Promosi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		a. Pengawasan Informasi Label/Kemasan: - Laporan Bulanan pengawasan penandaan produk OT dan SK UPT Badan POM; - Surat tindak lanjut hasil pengawasan informasi. - Evaluasi laporan pengawasan penandaan produk OT dan SK				
		b. Pengawasan promosi: - Laporan Bulanan hasil pengawasan promosi/iklan dari UPT Badan POM; - Surat tindak lanjut hasil pengawasan promosi/iklan; - Evaluasi bulanan Laporan Pengawasan Promosi/Iklan produk OT dan SK				
	PW.02.04	Pengawasan Keamanan dan Mutu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan OTSK
		Pengawasan Keamanan: a. Tindak lanjut temuan produk OT dan SK terkait TIE, BKO, pemalsuan dan kasus				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		lainnya b. Tindak lanjut laporan pengaduan c. Surveillance dan analisis resiko - Laporan efek samping OTSK (ESOTSK) - Kajian ESOTSK - Tindak lanjut ESOTSK d. Tindak lanjut laporan keamanan dari Badan Otoritas Negara Lain				
		Pengawasan mutu : a. Dokumen permohonan surat keterangan impor dan ekspor b. Surat keterangan impor dan ekspor c. Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi sampling dari BBPOM/BPOM d. Laporan Bulanan Hasil Sampling e. Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian produk OT dan SK f. Pedoman prioritas sampling g. Evaluasi hasil pengujian OTSK BBPOM/BPOM h. Evaluasi hasil pengujian OTSK P3OMN/BBPOM i. Laporan pengujian OTSK k. Tindak lanjut dan tanggapan pengujian l. <i>Public warning</i> m. Laporan bulanan hasil sampling dan pengujian produk OT dan SK o. Tindak lanjut tanggapan dan pengujian				
3	PW.03	Pengawasan Kosmetik				
	PW.03.01	Penilaian Sarana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	Direktorat Pengawasan Kosmetik

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					persaingan usaha tidak sehat	
		- Sertifikat/surat penerapan CPKB - Surat evaluasi/persetujuan denah - Surat keterangan fasilitas bersama.				
	PW.03.02	Inspeksi Sarana	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		- Laporan Bulanan hasil Inspeksi dari balai;				
		- Berita Acara Pemeriksaan Hasil inspeksi, tindak lanjut hasil inspeksi dan dokumen hasil evaluasi CAPA)				
		- Laporan Pengawasan Kasus				
	PW.03.03	Target Pengawasan Informasi dan Promosi BB/BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		Surat edaran target pengawasan promosi/iklan kosmetik BB/BPOM				
	PW.03.04	Target Pengawasan Informasi dan Promosi pada Sarana Produksi/distribusi Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		- Daftar target pemeriksaan promosi/ iklan dan informasi/ label kosmetik di sarana produksi/ distribusi kosmetik				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.03.05	Evaluasi Promosi/Iklan Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		Tabel rekapitulasi hasil evaluasi promosi/iklan kosmetik - Tabel produk kosmetik berupa TMK/MK - Evaluasi penandaan - Tabel produk kosmetik berupa MS/TMS - Laporan bulanan promosi atau iklan dan informasi atau label - Surat <i>feedback</i> ke BB/BPOM seluruh Indonesia atau surat peringatan ke pemilik notifikasi atau Nota Rekomendasi tindak lanjut ke unit atau instansi terkait - CAPA				
	PW.03.06	Evaluasi Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		- Tabel rekapitulasi hasil evaluasi informasi/label kosmetik				
	PW.03.07	Verifikasi Laporan Bulanan pengawasan promosi/iklan dan informasi/label kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		- Laporan bulanan pengawasan iklan dan penandaan dari BB/BPOM di seluruh Indonesia				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat klarifikasi kepada BB/BPOM bila ada laporan bulanan yang tidak lengkap agar melengkapi laporan bulanan - Hasil verifikasi terhadap temuan pelanggaran iklan kosmetik - Hasil verifikasi terhadap kesimpulan hasil evaluasi iklan atau penandaan kosmetika - Tabel produk promosi/iklan MK/TMK dan informasi/label kosmetik MS/TMS 				
	PW.03.08	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Promosi/Iklan dan Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		Surat tindak lanjut dan/atau rekomendasi ke unit/instansi lain berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Surat <i>feedback</i> ke BB/BPOM seluruh Indonesia - Surat peringatan ke pemilik notifikasi - Nota Rekomendasi tindak lanjut ke unit atau instansi terkait 				
	PW.03.09	Pemantauan dan Pendataan TLHP Promosi/Iklan dan Informasi/Label Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
	PW.03.10	Pengawasan Efek Samping dan Mutu Kandungan Produk	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Ceklis <i>monitoring</i> kosmetovigilans dari dalam dan luar negeri - Hasil evaluasi kelengkapan data laporan data efek samping - Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut 				
	PW.03.11	Pengawasan Mutu Ekspor Impor	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin SAS (<i>Special Access Scheme</i>) termasuk bukti bayarnya, rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2 - Hasil evaluasi permohonan izin SAS (<i>Special Access Scheme</i>), rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2 - Surat keterangan ekspor termasuk bukti bayarnya, izin SAS (<i>Special Access Scheme</i>), rekomendasi persetujuan impor, rekomendasi IP-B2 - Dokumen verifikasi teknis dalam rangka permohonan teknis - Berita Acara Pemeriksaan - Berita Acara Pengambilan Sampel - Tindak lanjut sampling - Hasil CoA - Laporan kegiatan layanan publik SKI/SKE - Formulir Layanan Informasi dan Pengaduan 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.03.12	Sampling dan Pengujian Kosmetik	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Kosmetik
		Berkas Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Sampling dari BBPOM/BPOM - Laporan Bulanan Hasil Sampling - Tindak lanjut hasil sampling - Pedoman prioritas sampling				
		Berkas evaluasi hasil pengujian Kosmetik BBPOM/BPOM - Laporan bulanan pengujian - Laporan Kosmetika TMS - Tindak Lanjut tanggapan dan pengujian				
		Berkas evaluasi hasil pengujian Kosmetik P3OMN/BBPOM - Laporan pengujian Kosmetik - Laporan hasil verifikasi/uji absah/uji rujukan - <i>Public warning</i> - Laporan bulanan pengujian - Laporan Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat - Tindak lanjut tanggapan dan pengujian				
4	PW.04	Pengawasan Pangan Olahan				
	PW.04.01	Pengawasan Sarana Produksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						Peredaran Pangan Olahan
		- Surat Tugas				
		- Dokumen hasil pemeriksaan sarana produksi (Laporan,Berita acara pemeriksaan dan form pemeriksaan)				
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan				
	PW.04.02	Pengawasan Sarana Distribusi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Surat Tugas				
		- Dokumen hasil pemeriksaan sarana distribusi (Laporan,Berita acara pemeriksaan dan form pemeriksaan)				
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi				
	PW.04.03	Pengawasan Produk Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengujian pangan				
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengujian pangan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.04.04	Pengawasan Label Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengawasan label pangan				
		- Dokumen tindak lanjut pengawasan label pangan				
	PW.04.05	Pengawasan Iklan Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengawasan iklan pangan				
		- Dokumen tindak lanjut pengawasan iklan pangan				
	PW.04.06	Pengawasan Ekspor dan Impor Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Dokumen permohonan surat keterangan ekspor				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Dokumen permohonan surat keterangan impor				
		- Dokumen permohonan rekomendasi pemasukan pangan olahan asal hewan				
		- Surat keterangan ekspor				
		- Surat keterangan impor				
		- Surat rekomendasi pemasukan pangan olahan asal hewan				
	PW.04.07	Pengawasan Kemasan Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengawasan kemasan pangan				
		- Dokumen tindak lanjut pengawasan kemasan pangan				
	PW.04.08	Penanganan Kasus Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Dokumen penanganan Kejadian Luar Biasa				
		- Dokumen INRASFF (Indonesia <i>Rapid Alert System for Food and Feed</i>)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Dokumen penanganan pengaduan konsumen				
		- Dokumen penanganan kasus lainnya				
	PW.04.09	Sertifikasi Pangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Dokumen permohonan verifikasi program manajemen risiko				
		- Dokumen hasil verifikasi program manajemen risiko				
		- Dokumen sidang komisi program manajemen risiko				
		- Piagam program manajemen risiko				
		- Dokumen permohonan sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB)				
		- Dokumen hasil audit CPPOB				
		- Sertifikat CPPOB				
	PW.04.10	Pengawasan Bahan Berbahaya	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
		- Laporan pengawasan bahan berbahaya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya				
V	PM	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA				
	PM.01	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
1	PM.01.01	Peningkatan Peran Pemerintah Daerah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan advokasi pemerintah daerah				
		- laporan advokasi lintas sektor				
2	PM.01.02	Pemberdayaan Komunitas Sosial dan Kemasyarakatan	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pembentukan Duta				
		- Laporan Pembentukan Kader				
		- Laporan KIE				
3	PM.01.03	Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pendampingan				
		- Laporan Pelatihan TOT				
		- Database Fasilitator				
4	PM.01.04	Pendampingan Pengembangan Bahan Alam Kosmetik	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pendampingan				
		- Laporan Pelatihan TOT				
		- Database Fasilitator				
5	PM.01.05	Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kosmetik	Terbatas		Terkait dengan kerahasiaan data advokasi	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos, Balai Besar/Balai, LOKA
		- Laporan Pendampingan				
		- Laporan Pelatihan TOT				
		- Database Fasilitator				
	PM.02	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN				
1	PM.02.01	Advokasi Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan Advokasi Pemerintah Daerah				
		- Laporan Advokasi Lintas Sektor				
		- Laporan Advokasi Komunitas Pendidikan				
		- Laporan Advokasi Ormas				
		- Laporan Advokasi Asosiasi				
2	PM.02.02	Asistensi Regulasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		Laporan Asistensi				
		Laporan Hasil Kajian				
		Dokumen Database penerbitan SPPIRT (sertifikat penyuluhan pangan industri rumah tangga)				
3	PM.02.03	Pendampingan Usaha		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		a. Pendampingan UMKM				
		- Hasil Uji Sarana Produksi	Terbatas		-	
		- Laporan Pendampingan	Biasa/Terbuka		-	
		- Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	Biasa/Terbuka		-	
		- Database Fasilitator UMKM	Terbatas		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		b. Pendampingan Usaha Ritel				
		- Laporan Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Laporan Pelatihan TOT	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Database Fasilitator/Kader	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Hasil Uji Sampling	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
4	PM.02.04	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan, Sikap, Perilaku, dan Keterampilan Keamanan Pangan				
		a. Bimtek dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Laporan Bimtek dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		- Database Peserta Bimtek dan Pelatihan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
		- Database Materi Bimtek dan Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		b. Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Laporan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		- Database Peserta Sosialisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan kerugian terkait data pribadi	
		- Database Materi Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		- Laporan Pameran	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	
		c. Produk Informasi Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
		- Database Produk				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Database Distribusi				
		d. Aplikasi Keamanan Pangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
VI	PD	PENINDAKAN				
1	PD.01	CEGAH TANGKAL				
	PD.01.01	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				
		Pedoman Cegah Tangkal	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Cegah Tangkal
		- Pedoman Cegah Tangkal beserta verbalnya - Nota dinas laporan kegiatan penyusunan pedoman - Surat penyampaian pedoman - Notulensi pembahasan penyusunan pedoman				
		Dokumen Kajian trend/analisis Kejahatan Obat dan Makanan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Direktorat Cegah Tangkal
		- Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan - Surat Tugas pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan				
		Dokumen Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya	Direktorat Cegah Tangkal

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pengungkapan secara prematur	
		- Kerangka Acuan Kegiatan - Laporan Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat - Grand Design Kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat				
	PD.01.02	Peta Rawan Kasus				
		Dokumen Petunjuk Teknis Pengisian Data Rawan Kasus	Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-	Direktorat Cegah Tangkal
		Hasil Analisis Verifikasi Data Rawan Kasus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Direktorat Cegah Tangkal
		- Analisis Kerawanan per Komoditi - Analisis Kejahatan Obat dan Makanan Tahunan UPT				
	PD.01.03	Penggalangan <i>Stakeholders</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Direktorat Cegah Tangkal
		- Kerangka Acuan Kegiatan - Laporan pelaksanaan kegiatan penggalangan pelaku usaha - surat undangan kegiatan penggalangan pelaku usaha				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- surat tugas kegiatan penggalangan pelaku usaha - survei/ kuesioner/ evaluasi/ kegiatan penggalangan pelaku usaha				
2	PD.02	Intelijen				
	PD.02.01	Penyusunan Informasi Intelijen Dasar/ <i>Basic Descriptive Intelligence</i> (BDI)	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	PD.02.02	Kegiatan Intelijen	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
		- Laporan Informasi				
	PD.02.03	Rencana Operasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 2. Dapat menghambat	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	
	PD.02.04	Operasi Intelijen - Laporan Intelijen	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	
	PD.02.05	Analisa dan Perkiraan Intelijen	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
3	PD.03	Penyidikan				
	PD.03.01	Pendalaman Informasi Tindak Pidana	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		- Laporan Pendalaman Informasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PD.03.02	Operasi Penyidikan	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		- Laporan Operasi Penyidikan				
		- Laporan Kemajuan Penyidikan Pusat				
		- Laporan Kemajuan Penyidikan UPT BPOM				
		- Laporan pemusnahan barang bukti				
	PD.03.03	Pembuatan Berkas Perkara	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan / atau administratif	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		- Berkas Perkara				
		- Surat P 19				
		- Surat P 21				
		- Dokumen Penyerahan Barang Bukti dan Tersangka (Tahap II)				
		- Putusan Hakim				
4	PD.04	SIBER				
	PD.04.01	Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan Melalui Siber				
		Laporan hasil patroli siber	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	Direktorat Siber Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Nota dinas pengajuan <i>profiling</i>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	
		Surat dinas pengajuan <i>takedown</i>	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	
		Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	
		Laporan analisis dan evaluasi	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	
	PD.04.02	Penyusunan profil pelanggaran/kejahatan obat dan makanan di ranah siber				
		- Rekomendasi tidak lanjut <i>profiling</i> produk berpotensi menyebabkan kerugian besar. (hak akses Rahasia)	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	Direktorat Siber Obat dan Makanan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pidana dan/atau administratif	
		- Rekomendasi tindak lanjut <i>profiling</i> (hak akses terbatas)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		
		Permohonan data akun	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara 2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administratif	
	PD.04.03	Analisis Digital Forensik				Direktorat Siber Obat dan Makanan
		Berita acara serah terima barang bukti peralatan elektronik	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
		Berita acara pengembalian barang bukti peralatan elektronik	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
		Laporan hasil analisis digital forensik	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
		Laporan evaluasi hasil analisis digital forensik	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau administrative 2. Dapat menghambat penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
VII	PP	PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL				
1	PP.01	Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan				
	PP.01.01	Kegiatan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					2. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	
		a. Kegiatan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan di PPPOMN				
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Pengujian - Surat Perintah Bayar (SPB) - CoA (<i>Certificate of Analysis</i>) - Formulir Penerimaan Sampel - Formulir Kaji Ulang Permintaan Pengujian - Formulir Kartu Kendali Sampel - Formulir Ketidaksesuaian Sampel - Formulir Pengendalian Pekerjaan yang tidak sesuai - Lembar Disposisi - Formulir Pelayanan - Buku Besar Sampel (<i>Soft/hard copy</i>) - Buku Ekspedisi sampel - Buku Ekspedisi Ka. P3OMN - Buku Ekspedisi Sertifikat/Laporan Pengujian - Buku Ekspedisi Internal R. Sampel - Buku Ekspedisi BB/BPOM - Buku Ekspedisi Internal BPOM - Buku Ekspedisi Arsip Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Perintah Kerja - Surat Perintah Uji - Surat Perintah Pengujian - Formulir Catatan Pengujian - Formulir Lampiran Catatan Pengujian - Formulir Laporan Hasil Uji 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Konsep Sertifikat/Laporan Pengujian - Sertifikat/Laporan Pengujian - Suplemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Amandemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Pengantar Sertifikat/Laporan Pengujian 				
		b. Kegiatan Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan di UPT BPOM				
	PP.01.02	Tanggapan Hasil Pengujian BB/BPOM/Uji Absah	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Uji Absah - CoA (<i>Certificate of Analysis</i>) - Formulir Penerimaan Sampel - Formulir Kaji Ulang Permintaan Pengujian - Formulir Kartu Kendali Sampel - Formulir Ketidaksesuaian Sampel - Formulir Pengendalian Pekerjaan yang tidak sesuai - Lembar Disposisi - Formulir Pelayanan - Buku Besar Sampel (<i>Soft/hard copy</i>) - Buku Ekspedisi sampel - Buku Ekspedisi Ka. P3OMN - Buku Ekspedisi Sertifikat/Laporan Pengujian 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Ekspedisi Internal R. Sampel - Buku Ekspedisi BB/BPOM - Buku Ekspedisi Internal BPOM - Buku Ekspedisi Arsip Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Perintah Kerja - Surat Perintah Uji - Surat Perintah Pengujian - Formulir Catatan Pengujian - Formulir Lampiran Catatan Pengujian - Formulir Laporan Hasil Uji - Formulir Konsep Sertifikat/Laporan Pengujian - Laporan Tanggapan Hasil Uji TMS BB/BPOM - Suplemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Amandemen Sertifikat/Laporan Pengujian - Surat Pengantar Sertifikat/Laporan Pengujian 				
2	PP.02	Pengembangan Metode Analisis (Validasi/Verifikasi) dan Uji Kolaborasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan usulan Judul Metode Analisis ke Bidang bidang - Surat Usulan permintaan /judul MA ke DitWas Kedeputian - Dokumen perencanaan kegiatan pembuatan MA (POA) - Surat permintaan TIM Metode Analisa -SK Penetapan TIM Metode Analisa - Surat Permintaan usulan pengadaan reagen /media dan alat fungsional lainnya 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat pemberitahuan uji kolaborasi ke UPT BPOM - Surat permintaan tim ahli MA - Undangan pembahasan MA - Daftar Hadir pembahasan MA - Notulensi pembahasan - <i>Draft</i> Naskah Validasi MA - Buku naskah validasi MA - Surat pengiriman buku MA ke UPT/ Unit BPOM - Surat undangan Sosialisasi MA - Daftar Hadir - Notulensi sosialisasi - Metode Analisis 				
3	PP.03	Pengembangan dan Distribusi Baku Pemanding				
	PP.03.01	Pengembangan Baku Pemanding	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Permintaan Usulan Calon Baku Pemanding - Surat Undangan Rapat Koordinasi - Daftar hadir/peserta - Notulensi - Data Baku Pemanding yang akan dikembangkan - SPK - Formulir uji pendahuluan dalam rangka pengembangan BP kimia - CP/LCP 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar Uji Kolaborasi, Protokol dan Evaluasi Hasil Uji Kolaborasi - Surat Undangan Pembahasan Baku Pembanding - Daftar Hadir/peserta Pembahasan Baku Pembanding - Notulensi Pembahasan Baku Pembanding - Laporan dan Sertifikat Analisis Baku Pembanding 				
	PP.03.02	Pengelolaan dan Distribusi Baku Pembanding untuk Internal BPOM	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
	PP.03.03	Distribusi baku pembanding untuk eksternal	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan Baku Pembanding dari Eksternal - Surat Perintah Bayar (SPB) - Berita Acara Serah Terima Baku Pembanding untuk PNB 				
4	PP.04	Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian				
	PP.04.01	Kegiatan Kalibrasi di Internal BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat permintaan jadwal rencana kalibrasi periode tahunan - Surat konfirmasi persetujuan kalibrasi 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar alat yang akan dikalibrasi - Form persetujuan membawa alat kalibrator - Surat tugas - Formulir evaluasi pelaksanaan kalibrasi - Lembar hasil pengamatan - Lampiran hasil kalibrasi - Sertifikat kalibrasi - Formulir penerimaan hasil kalibrasi 				
	PP.04.02	Kegiatan Kalibrasi di Eksternal BPOM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Kalibrasi - Surat Penawaran Harga Kalibrasi - Surat Perintah Bayar (SPB) - Surat Tugas - Formulir evaluasi pelaksanaan Kalibrasi - Lembar hasil pengamatan - Lampiran hasil Kalibrasi - Sertifikat Kalibrasi - Formulir penerimaan hasil Kalibrasi 				
5	PP.05	Penyediaan Hewan Uji/Baku Mikroba				
	PP.05.01	Kegiatan Pengembangbiakan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Hewan Uji Baku Mikroba	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		– Dokumen rencana kegiatan pengadaan hewan uji dan baku mikroba				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> – Surat permintaan pembelian / pengadaan hewan, pakan hewan, beding, Obat hewan alat fungsional lainnya, dan perbaikan sarana prasarana, – Surat Pemberitahuan kegiatan lembur – Surat Perintah Kerja – Surat Perintah Pengerjaan – Dokumen/ Formulir - formulir yang berhubungan dengan pembiakan , pemeliharaan dan pengelolaan hewan uji – Dokumen pemeliharaan baku mikroba – Stock opname hewan uji (aplikasi/ <i>softcopy</i>) – stock opname pakan hewan (aplikasi/ <i>softcopy</i>) 				
	PP.05.02	Kegiatan Pengembangbiakan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Hewan Uji Baku Mikroba	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none"> – Formulir permintaan dan penyerahan hewan percobaan – Formulir permintaan dan penyerahan pakan hewan – Surat permintaan pembelian hewan uji/ baku mikroba – Surat Perintah Bayar (SPB) – Lembar bukti pembayaran dari bank – Lembar SIMPONI – Formulir penyerahan hewan percobaan kepada pelanggan eksternal – Surat keterangan sehat hewan uji 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none">- Sertifikat analisis baku mikroba- <i>End user agreement</i>				
6	PP.06	Uji Profisiensi/Uji Banding	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		<ul style="list-style-type: none">- Surat pemberitahuan pelaksanaan uji profisiensi/uji banding- Formulir konfirmasi keikutsertaan uji profisiensi/uji banding- Surat Perintah Bayar (SPB)- Surat pemberitahuan pengiriman sampel uji profisiensi/ uji banding- Formulir penerimaan sampel uji profisiensi/uji banding- Prosedur pelaksanaan uji profisiensi/uji banding untuk peserta- Formulir hasil pengujian uji profisiensi/uji banding untuk peserta- Laporan pelaksanaan uji profisiensi/ uji banding				

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO